

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EFEKTIVITAS PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
LAHAN PERKARANGAN MELALUI KELOMPOK WANITA
TANI DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Penyusunan Skripsi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh:

RIKA MELANDANI
177310490

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
5. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

6. Pj. Kepala Desa Sibabat yang telah bersedia memberikan data-data awal yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ketua PKK Desa Sibabat, Anggota KWT Kates Jingga yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pengumpulan data penelitian penyusunan skripsi ini.
8. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, Agustus 2021

Ttd

Penulis,

Rika Melandani
NPM: 177310490

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	18
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	 20
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Pemerintahan.....	20
2. Efektivitas.....	24
3. Kebijakan Publik.....	26
4. Pelaksanaan.....	29
5. Optimalisasi.....	30
6. Lahan Perkarangan.....	32
7. Kelompok Tani.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Pikir.....	36
D. Konsep Operasional.....	38
E. Operasionalisasi Variabel.....	39
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	41
D. Teknik Penetapan Informan.....	41
E. Jenis dan Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
A. Gambaran Desa Sibabat	47
B. Profil KWT Kates Jingga	50
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Identitas Informan	52
B. Analisis Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani.....	53
1. Pencapaian Tujuan	55
2. Integrasi.....	65
3. Adaptasi.....	73
C. Faktor Penghambat Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani.....	79
1. Pencapaian Tujuan	79
2. Integrasi Program	80
3. Adaptasi.....	81
BAB VI : PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Jumlah Kelompok Tani Wanita di Provinsi Riau	14
I.2	Nama Kelompok Tani Wanita di Kabupaten Indragiri Hulu.....	15
II.1	Penelitian Terdahulu	34
II.2	Operasional Variabel Tentang Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	39
III.1	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	4
IV.1	Pendidikan Masyarakat Desa Sibabat.....	49
IV.2	Mata Pencarian Penduduk Desa Sibabat.....	49
V.1	Identitas Informan Penelitian.....	52
V.2	Jenis dan Usia Tanaman pada KWT Kates Jingga	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Alur Program KRPL	10
I.2 Alur Optimalisasi KRPL.....	14
II.1 Kerangka Pikir Tentang Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	37
III.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	44
IV.1 Struktur Organisasi KWT Kates Jingga.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Tanggapan Informan
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian
5. Surat Keterangan Lulus Plagiasi



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Melandani
NPM : 177310490
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2021
Pelaku Pernyataan,



Rika Melandani
NPM: 177310490

ABSTRAK**EFEKTIVITAS PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN
PERKARANGAN MELALUI KELOMPOK WANITA TANI DI
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh:

Rika Melandani
NPM: 177310490

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk mengetahui apasaja Faktor Penghambat Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Wanita Tani Kates Jingga di Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lokasi penelitian. Untuk memperoleh data penelitian ditetapkan informan utama dan informan tambahan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif, kemudian dianalisis dan dibahas secara ilmiah, lalu dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa belum efektifnya Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani yang dijalankan KWT Kates Jingga Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Hambatan dalam melaksanakan program optimalisasi lahan perkarangan ini dilihat dari *Pertama* belum seluruh anggota kelompok mendukung terwujudnya program KRPL yang dijalankan KWT Kates Jingga sesuai yang direncanakan, *Kedua* belum tercapainya pelaksanaan program, *Ketiga* belum mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam mengatasi berbagai permasalahan pertanian.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Kelompok Wanita Tani

ABSTRACT

*THE EFFECTIVENESS OF THE OPTIMIZATION OF THE UTILIZATION OF
ROAD LAND THROUGH WOMEN FARMING GROUPS IN SEBERIDA
DISTRICT, INDRAGIRI HULU REGENCY*

By:

Rika Melandani
NPM: 177310490

The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the optimization program for land use optimization through women's farmer groups in Seberida sub-district, Indragiri Hulu district. To find out what are the Inhibiting Factors in the Optimization Program for Utilization of Gardening Land through Women Farmers Groups in Seberida District, Indragiri Hulu Regency. This type of research is qualitative with a descriptive approach. Women Farmers Kates Jingga in Sibabat Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency as the research location. To obtain research data, the main informants and additional informants were determined. The data collected in this research is through field studies, namely by conducting interviews, observations, and documentation. All data collected are classified according to type and form then presented descriptively, then analyzed and discussed scientifically, then conclusions can be drawn from the research results. Based on the results of the research and discussion, it was found that the Optimization Program for the Optimization of Gardening Land Utilization through the Women Farmers Group was carried out by KWT Kates Jingga, Sibabat Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency. The obstacles in implementing the yard optimization program are seen from First, not all group members support the realization of the KRPL program run by KWT Kates Jingga as planned, Second, the program implementation has not been achieved, Third has not been able to adapt to the times in overcoming various agricultural problems.

Keywords: Effectiveness, Program, Women Farmer Group

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kembali meluncurkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dalam rangka mempercepat penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dengan adanya anjuran pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan dan lahan di sekitar lainnya belum dimanfaatkan secara optimal.

Pemanfaatan pekarangan mengeluarkan biaya sedikit di dalam melaksanakan penanaman di dalam pekarangan tersebut akan dapat hasil yang lebih banyak, sehingga dengan usaha memanfaatkan tanah pekarangan itu berarti keluarga bersangkutan telah melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi di dalam meningkatkan pendapatan. Untuk dapat menunjang suksesnya tanaman-tanaman di dalam pekarangan tersebut perlu pula melakukan pemupukan dengan pupuk kandang, kompos yang diperoleh tanpa membeli atau diperoleh dari dalam pekarangan itu sendiri. Jika ada bibit penyakit pada tanaman di dalam pekarangan

tersebut disarankan supaya sebaiknya di dalam melakukan pemberantasan jangan memakai obat-obatan yang untuk memperolehnya harus mengeluarkan uang tetapi sebaiknya diberantas dengan membakar sampah-sampah sedikit demi sedikit.

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan kewajiban semua pihak untuk mewujudkannya. Penanganan masalah pangan akan memerlukan usaha kerjasama berbagai kelompok yang berkepentingan. Perencanaan untuk meningkatkan pengadaan pangan pada tingkat masyarakat yang tinggal di daerah pertanian adalah penting, baik untuk pembangunan nasional maupun untuk kesejahteraan manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menciptakan kemandirian pangan agar tercapai kebutuhan pangan yang dikehendaki.

Dalam menjalankan berbagai program kerja pemerintahan salah satunya di bidang ketahanan pangan, tentunya tidak terlepas dari ketentuan yang berlaku terutama mengenai urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana pada Pasal 9 disebutkan bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahanabsolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusanpemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnyajadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagiantara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerahkabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerahmenjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan urusan pemerintahan di atas, kemudian dijelaskan dalam Pasal 10 dan 11. Di mana dalam Pasal 10 dijelaskan Urusan Pemerintahan Absolut berikut:

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. Politik luar negeri;
 - b. Pertahanan;
 - c. Keamanan;
 - d. Yustisi;
 - e. Moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. Agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 - a. Melaksanakan sendiri; atau
 - b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Sementara dalam Pasal 11 dijelaskan mengenai urusan Pemerintahan Konkuren bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;**
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;**
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Program Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi daerah di mana poin pangan menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat melalui salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan. Kemudian program ini dilaksanakan khusus pada bidang pertanian, sehingga menjadi urusan

pemerintahan pilihan yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah masing-masing dalam melaksanakan pertanian.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tidak hanya sekedar memenuhi kuantitas pangan tetapi juga kualitasnya. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Penjabaran dari Undang-Undang Pangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di mana dalam Pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganeekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 telah melaksanakan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan, pada tahun 2020 kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L. Kegiatan P2L dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/ atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi

rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh wanita, sehingga wanita memiliki peran dalam ketersediaan pangan di lingkungannya dan juga mampu memberi kontribusi bagi membantu pendapatan keluarga.

Tujuan dari Kegiatan P2L yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari secara nasional dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu :

Tahun 2015 (KRPL) : 4.410 Kelompok Wanita Tani

Tahun 2016 (KRPL) : 2.894 Kelompok Wanita Tani

Tahun 2017 (KRPL) : 1.305 Kelompok Wanita Tani

Tahun 2018 (KRPL) : 2.300 Kelompok Wanita Tani

Tahun 2019 (KRPL) : 2.300 Kelompok Wanita Tani

Tahun 2020 (P2L) : 3.600 Penerima Manfaat

Kelompok yang terbentuk sebagai suatu sistem sosial tentu saja bukan hanya sebagai wadah untuk berkumpul, akan tetapi kelompok memiliki fungsi yang dapat dirasakan oleh anggota kelompok. Selain kelompok tani terdapat juga kelompok wanita tani yang anggotanya terdiri dari wanita tani dan berkecimpung dalam kegiatan pertanian. Wanita tani merupakan perempuan yang dewasa maupun muda dalam keluarga petani dan masyarakat pertanian yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan ikut bertanggung jawab dalam kegiatan usaha tani dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan usaha peningkatan kesejahteraan keluarganya yang tentunya tidak dapat terlepas dari motivasi masing-masing individu

Kegiatan KRPL juga dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penurunan kemiskinan melalui kegiatan padat karya, penanganan daerah, serta penanganan daerah rentan rawan pangan. Pelaksanaan kegiatan KRPL perlu dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lainnya, baik dalam pelaksanaan maupun pembiayaannya. Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai integrator utama di daerah, memiliki peranan penting dalam mengoordinasikan kegiatan KRPL, khususnya terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai agen pembawa perubahan.

Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan

sekitar tempat tinggal.

2. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
3. Mendorong pemanfaatan pekarangan dengan menanam tanaman buah-buahan, sayuran, perikanan dan peternakan untuk peningkatan konsumsi keluarga.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui kegiatan KRPL pada tahap penumbuhan seperti:

1. Pembuatan Demplot
2. Pengembangan Lahan Pekarangan
3. Pengolahan Hasil Pekarangan (BS2A)

Setiap kelompok tersebut telah terbentuk saat adanya Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan, sehingga pada saat Program tersebut diterima oleh masing-masing desa telah memiliki kelompok wanita tani untuk melaksanakan kegiatan KRPL. Dengan demikian jelaslah bahwa salah satu pemanfaat dari program KRPL ini adalah wanita dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya yakni lahan perkarangan untuk menghasilkan ketersediaan pangan.

Salah satu kelompok yang mendapatkan pemberdayaan dari program ini adalah Kelompok Wanita Tani. Di mana pada kebanyakan tempat KWT merupakan bentukan dari PPK yang ada di desa, sehingga jelas terdapat

perbedaan antara KWT dan PKK baik dari segi fungsinya maupun dari jumlah anggota yang ada telah diatur sedemikian rupa.

Kelompok Tani Wanita dalam menjalankan program ini melakukan kegiatan Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui konsep KRPL dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT)/dasawisma yang beranggotakan minimal 15 rumah tangga dengan kegiatannya meliputi:

- a. Sosialisasi pemanfaatan pekarangan melalui pendampingan dan pelatihan;
- b. Pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan;
- c. Pembuatan kebun bibit;
- d. Pengembangan pekarangan anggota;
- e. Pendampingan dan Penyuluhan pangan B2SA Praktek/demonstrasi penyediaan menu B2SA; dan
- f. Pengolahan hasil KRPL.

Bagan program KRPL berdasarkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 58/PTS/RC.110/J/12/2018 Tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019 sebagai berikut:

```
graph LR; A[Pemerintah Pusat] --> B[Pemerintah Provinsi]; B --> A; B --> C[Pemerintah Kabupaten/Kota]; C --> B; C --> D[Kelompok Wanita Tani]; D --> C; E[Pendamping Pertanian] -.-> C; E -.-> D;
```

Keterangan Garis:

- : Alur Pelaksanaan Program
- ← : Alur Pelaporan Program

—————▶ : Alur Pelaksanaan Program
 ◀————— : Alur Pelaporan Program
 - - - - - : Alur Pembinaan

Berdasarkan bagan di atas, maka dapat diuraikan pelaksanaan kegiatan masing-masing tingkatan sebagai berikut:

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- ## 2. Pemerintah Provinsi

Dinas/Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi

bertanggung jawab melakukan:

- Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan KRPL.
- Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan KRPL.
- Mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan KRPL ke pusat.

3. Pemerintah Kabupaten

Dinas/Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan:

- a. Sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan KRPL.
- b. Membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan KRPL ke dinas/unit kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat provinsi.
- c. Melakukan identifikasi dan seleksi CPCL KRPL.
- d. Mengusulkan CPCL KRPL yang telah diidentifikasi dan diseleksi kepada dinas/unit kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat provinsi.
- e. Mengoordinasikan dengan instansi terkait agar calon penerima manfaat terdaftar dalam aplikasi Simultan.
- f. Mengusulkan pendamping kegiatan KRPL kepada dinas/unit kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat provinsi.
- g. Melakukan pengawasan dan pembinaan pendamping.

4. Kelompok KRPL/Masyarakat

Kelompok penerima manfaat bertanggungjawab:

- a. Pemanfaatan dana bantuan pemerintah
- b. Penyusunan RKKA
- c. Pelaksanaan semua komponen kegiatan sesuai juknis yang meliputi kebun bibit, demplot, dan pengembangan pekarangan.
- d. Pembukuan yang minimal terdiri dari: buku pembelian, buku penjualan, buku besar dan buku kas.
- e. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran
- f. Pelaporan kegiatan KRPL.

5. Pendamping

Pendamping melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendampingi dan membimbing kelompok KRPL sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dinas/unit kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan KRPL secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada kelompok KRPL.
- c. Melaksanakan kunjungan dan pembinaan secara rutin minimal satu kali dalam dua minggu kepada kelompok KRPL.
- d. Membuat laporan yang ditujukan kepada dinas/unit kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta pusat.

Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut di atas pada tingkat Kabupaten, maka di Kabupaten Indragiri Hulu dilimpahkan kewenangan bidang pertanian tersebut pada Dinas Ketahanan Pangan. Hasil ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas memiliki struktur organisasi berikut:

- a. Kepala Dinas Ketahanan Kertahanan Pangan
- b. Sekretariat, terdiri atas
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan
 - 2) Seksi Sumberdaya Pangan
 - 3) Seksi Kerawanan Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas
 - 1) Seksi Distribusi Pangan
 - 2) Seksi Harga Pangan
 - 3) Seksi Cadangan Pangan
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan
 - 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - 3) Seksi Keamanan Pangan

Berdasarkan struktur organisasi yang telah ditampilkan di atas, maka dari sekian bagian dan seksi yang ada terdapat salah satu bagian yang bersentuhan langsung menangani kelompok wanita tani (KWT) dalam memanfaatkan lahan perkarangan sebagai lokasi bertani adalah Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut:

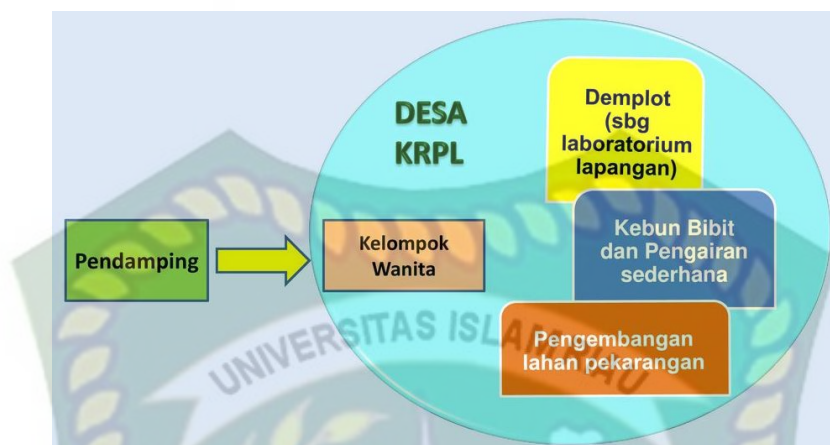
- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan
- b. Penyusunan rencana koordinasi dan Standar Operasional Prosedur bidang konsumsi dan keamanan pangan

- c. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan
- d. Koordinasi pelaksanaan penghitungan angka konsumsi, tingkat konsumsi pemanfaatan lahan pekarangan, penyusunan peta pola konsumsi masyarakat, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, kerja sama percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengelolaan keamanan pangan
- e. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi bidang konsumsi dan keamanan pangan

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam mengoptimalkan program pemanfaatan lahan pekarangan melalui kelompok wanita tani, maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu menjadi salah satu instansi yang berwenang menyelenggarakan fungsi tersebut dengan tugas dan fungsi berada di pundak Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Perikanan.

Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang diselenggarakan pemerintah ini dilaksanakan mengacu pada pedoman teknis yang dikeluarkan setiap tahunnya atau setiap program akan dilaksanakan. Di mana pada tahun 2019 lalu program dilakukan dengan optimalisasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar I.2 Alur Optimalisasi KRPL



Sumber: Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2019.

Salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dari Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah Provinsi Riau. Di mana hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dari tahun 2016 sampai 2019 memperoleh bantuan dana kegiatan tersebut, namun pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19, maka kegiatan ini terjadi rasionalisasi anggaran sehingga belum diperoleh data mengenai penerima manfaat.

Adapun jumlah kelompok tani wanita yang ada di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Kelompok Tani Wanita di Provinsi Riau

No	Kabupaten	Jumlah Kelompok Tani Wanita
1	2	3
1	Siak	28
2	Pekanbaru	34
3	Bengkalis	31
4	Pelalawan	20
5	Indragiri Hulu	23
6	Dumai	19
7	Rokan Hulu	36
8	Rokan Hilir	37

1	2	3
9	Kepulauan Meranti	21
10	Kuantan Singingi	27
11	Kampar	17
12	Indragiri Hilir	9
Jumlah		302

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, 2020

Berdasarkan tabel di atas, jelaslah bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki kelompok tani wanita. Di mana jumlah kelompok tani wanita terbanyak terdapat pada kabupaten Rokan Hilir dan jumlah kelompok tani wanita yang paling sedikit berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dari data tersebut penelitian ingin memfokuskan pada Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Indragiri Hulu salah satu kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memiliki kelompok tani wanita dan memperoleh bantuan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari dari tahun 2016-2019. Adapun sebaran jumlah kelompok wanita tani di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

Tabel I.2 Nama Kelompok Wanita Tani di Indragiri Hulu

No.	Nama Kelompok	Desa	Kecamatan
1	2	3	4
1.	Mekar Sari	Bukit Lingkar IV	Batang Cenaku
2.	Kelompok Wanita Tani	Siambul	Batang Gasal
3.	Dusun Lestari	Dusun Tua	Kelayang
4.	Kelompok Tani Melati	Simpang Kelayang	Kelayang
5.	Kelompok Wanita Tani Nusa Indah	Semelinang Darat	Peranap
6.	Dahlia	Lubuk Sitarak	Rakit Kulim
7.	Kelompok Wanita Agrilia	Pematang Reba	Rengat Barat
8.	Kelompok Wanita Tani Terpadu Sekip Hilir	Sekip Hilir	Rengat
9.	KWT Mawar Kuala	Kuala Lala	Sungai Lala
10.	KWT Jata Makmur	Kelawat	Sungai Lala
11.	Kelompok Wanita Tani Barokah	Lambang Sari	Lirik
12.	Kelompok Tani Rosela	Wonosari	Lirik

1	2	3	4
13.	Kelompok Tani Wanita Tulip	Lambang Sari IV	Lirik
14.	Kelompok Tani Seroja	Seresam	Seberida
15.	Seroja	Talang Bersemi	Seberida
16.	Kelompok Wanita Tani Mawar	Kelesa	Seberida
17.	KWT Dahlia Indah	Seresam	Seberida
18.	Kelompok Wanita Tani Kates Jingga	Sibabat	Seberida
19.	Kelompok Tani Dahlia	Kulim Jaya IV	Lubuk Batu Jaya
20.	Kartini Berkarya	Rimpian Lubuk Batu	Lubuk Batu Jaya
21.	Kelompok Wanita Tani Rowdatul Jannah	Candirejo	Pasir Penyu
22.	Bingke Kamboja Kelompok Wanita Tani	Tanjung Gading	Pasir Penyu
23.	KWT Sri Gading	Lembah Dusun Gading	Pasir Penyu

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu, 2020.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, jelaslah bahwa salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki kelompok wanita tani dan telah mendapatkan bantuan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah di Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan kelompok wanita tani diberi nama Kates Jingga.

KWT Kates Jingga Desa Sibabat memfokuskan diri dalam pemanfaatan lahan perkarangan yang ada di belakang posyandu milik desa. Lahan milik desa ini tidak termanfaatkan, sehingga layak untuk dikelola sebagai lahan pertanian yang diusahakan oleh KWT Kates Jingga. Kelompok ini dalam menjalankan kegiatan pertanian terfokus pada tanaman sayur-sayuran, buah-buah, tanaman bumbu masak/dan obat.

Dari masalah yang dipaparkan di atas peneliti menemukan beberapa fenomena di lapangan yakni:

1. Belum tercapainya tujuan antara kelompok wanita tani dengan tenaga penyuluh pangan sebagaimana yang diharapkan, sehingga kelompok wanita tani kurang mendapatkan pemahaman dalam memanfaatkan teknologi pada bercocok tanam di lahan perkarangan.
2. Belum terintegrasi seluruh anggota kelompok wanita tani memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bercocok tanam, sehingga terdapat beberapa tanaman pangan tidak terawat dengan baik.
3. Masih kurangnya kunjungan penyuluh pangan pada kelompok wanita tani dalam mewujudkan proses beradaptasi pemanfaatan lahan perkarangan.
4. Kurangnya pemahaman anggota kelompok wanita tani dalam berorganisasi, sehingga fungsi-fungsi organisasi ketua, bendahara, dan sekretaris hanya dianggap sebagai orang-orang yang bisa mencairkan dana bantuan.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat ke dalam tulisan berjudul **“Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apasaja Faktor Penghambat Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui apasaja Faktor Penghambat Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan terutama manajemen pemerintahan.
- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti serta mempelajari masalah Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani.

- c. Secara praktis dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah umumnya dan khususnya bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

a. Pengertian

Sebelum melihat konsep teori dalam penelitian ini, terlebih dahulu diangkat definisi pemerintahan yang dipandang sebagai ilmu. Sebagaimana diungkapkan Suryaningrat (dalam Syafiie, 2013;34) bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosof yaitu Plato dan Aristoteles.

Ilmu pemerintahan adalah sesuatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2015;20).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin di bidang legislasi, eksekutif, dan yudikatif, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara pemerintah dengan yang diperintah.

Pada dasarnya pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan lembaga, pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Secara etimologi pemerintah berasal dari kata "perintah" yang ditambah dengan awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga pemerintahan berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah.

Pemerintah adalah sesuatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2015;11).

Budiarjo (2013;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah sesuatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Menurut Ndraha (2011;36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan

masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Dengan demikian pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama pemerintahan ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara itu, tugas dan kewenangan berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa tokoh yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan pemerintah merupakan suatu organisasi, dimana di dalamnya terdapat orang-orang yang menjalankan tugas ataupun menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat ataupun Negara. Untuk menjalankan roda pemerintah khususnya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah harus mampu mengayomi masyarakat serta bersifat adil dan bijaksana, sehingga sesuai dengan fungsinya sebagai pemerintah.

b. Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011;85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat di masa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Namun di dalam

menjalankan ketiga fungsi di atas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

2. Efektivitas

Mahmudi (2011:92) mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Kemudian menurut Kurniawan (2005:109) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran "*doing the right things*". Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Efektivitas menurut Tobing (2011:29) merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan

Pendapat Duncan yang dikutip Steers (1985:46-48) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Dengan demikian pencapaian tujuan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk mulai dari awal sampai akhir dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang konkret, (3) dasar hukum.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dengan demikian integrasi merupakan penilaian atas kemampuan suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisasi.).

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dengan demikian adaptasi merupakan proses

penyesuaian dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana.

3. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan

Rose (dalam Agustino, 2012;7) kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Carl dalam Agustino (2012;7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Nugroho (2008;55) mengatakan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan

Dari hal tersebut diketahui bahwa kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu : (Nugroho, 2008;62)

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro

Selanjutnya istilah publik dalam rangkaian kata publik policy mengandung tiga konotasi : pemerintah, masyarakat dan umum. Sedangkan menurut Nugroho (2008;65) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan.

Membahas teori kebijaksanaan negara dan administrasi pembangunan (Emaya, 2004;117), tidak bisa lepas dari administrasi yang mencakup proses pencapaian tujuan dan sasaran, aturan-aturan atau cara-cara melalui kebijaksanaan atau program yang bersifat menyeluruh dan terkait dengan kepentingan tertentu.

b. Kriteria Kebijakan

Menurut Dunn (2003;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/ instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Dengan demikian dapat juga diketahui bahwa menurut Nugroho (2008;115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan

3. Evaluasi kebijakan

Selain itu Nugroho (2008;149) juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai enam (6) kriteria utama yaitu :

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Kelayakan

Easton dalam Lubis (2007;8) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintahan itu sebagai “kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai” bagi masyarakat secara menyeluruh kepentingan masyarakat ialah pemerintah, bukan lembaga yang lain.

Selanjutnya Hessel (2005;13) menjelaskan pembuatan kebijakan yang baik dapat dilakukan dengan cara :

1. Kebijakan harus relevan terhadap kebutuhan masyarakat
2. Kebijakan harus memiliki alternatif pemecahan masalah
3. Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas
4. Kebijakan harus memiliki evaluasi pelaksanaan

Kebijakan publik menurut Dye dalam Subarsono (2009;2) jadilah apapun pilihan pemerintahan untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi kebijakan publik yang di kemukakan Dye tersebut mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Marshall dalam Suharto (2008;10) menjelaskan bahwa kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:68) “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”.

Menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7) “Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”. Kemudian Wiestra, dkk (2014:12) ”Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

5. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:562) ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan. Sedangkan menurut Siringoringo (2005:4) Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Manfaat Optimalisasi yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan
2. Mengatasi kendala
3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana produksi ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi. Optimalisasi proses produksi merupakan cara untuk memaksimalkan hasil produksi (output).

Optimalisasi produksi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi sehingga rencana produksi atau target produksi dapat dicapai

dengan tepat. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki

Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu.

6. Lahan Perkarangan

Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah atau bangunan tempat tinggal atau fasilitas publik dengan batas pemilikan yang jelas (Kementrian Pertanian RI Badan Ketahanan Pangan, 2017). Pekarangan mempunyai potensi yang besar sebagai penunjang berbagai kebutuhan hidup sehari-hari pemiliknya. Tanaman pekarangan banyak memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai tambahan atau pengganti makanan pokok. Dengan terjadinya perbedaan orientasi penggunaan pekarangan ke arah komersialisasi menyebabkan banyak hasil tanaman pekarangan dijual untuk menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang pendapatan perekonomiannya masih rendah (Haerudin, 2010).

Pemanfaatan lahan pekarangan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya sebagai warung hidup dan apotek hidup, menambah pendapatan keluarga, menyediakan bahan-bahan bangunan, serta memberikan keindahan di lingkungan tempat tinggal. Lahan pekarangan juga dapat dijadikan aset berharga bagi pengembangan usaha tani skala rumah tangga. Oleh sebab itu, pemanfaatan lahan pekarangan dapat dijadikan basis usaha pertanian dalam rangka

memberdayakan sumber daya keluarga serta meningkatkan ketahanan pangan dan kecukupan gizi. Lahan pekarangan berpotensi untuk dimanfaatkan secara intensif baik untuk kepentingan ekonomi maupun sosial (Rukmana, 2009).

Upaya pemanfaatan lahan pekarangan didukung oleh pemerintah dengan dikeluarkannya program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang diterapkan pada kelompok masyarakat khususnya pada kelompok tani di pedesaan maupun perkotaan. Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan aktivitas atau tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dalam memenuhi gizi warga setempat. Adapun tujuan dari kegiatan KRPL yaitu:

1. Memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam pengadaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal.
2. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) (Kementrian Pertanian RI Badan Ketahanan Pangan, 2017).

Upaya pemanfaatan lahan melalui KRPL dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Manfaat lainnya yang diperoleh yakni berkurangnya pengeluaran keluarga sekaligus dapat memberikan tambahan pendapatan keluarga jika hasil 7

yang diperoleh telah melebihi kebutuhan pangan keluarga (Kementrian Pertanian RI Badan Ketahanan Pangan, 2017).

KRPL adalah bentuk integrasi dari sekumpulan pekarangan untuk memenuhi penyediaan pangan rumah tangga. Agar kegiatan KRPL dapat memberikan keindahan lingkungan maka perlu adanya penataan pekarangan. Penataan ini diperlukan untuk mengatur KRPL agar membentuk lingkungan yang asri dan nyaman, juga menimbulkan daya tarik sehingga dapat menarik minat orang lain untuk melakukan replikasi.

7. Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kelembagaan pertanian atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya serta ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dalam berusaha tani, kesamaan baik dalam hal tradisi, pemukiman, maupun hamparan lahan usaha tani (Pusat Penyuluhan Pertanian, 2012).

Syahyuti (2007) mengatakan kelompok tani merupakan sebuah lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa, bisa berdasarkan komoditas, areal tanam pertanian dan gender. Dengan demikian, untuk mengetahui gerak pembangunan pertanian perlu perhatian terhadap kelompok tani yang ada di desa.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kelompok tani adalah sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang dengan visi dan misi untuk

mencapai tujuan sama. Dalam hal ini mencapai tujuan pada bidang pertanian dengan menjalankan usaha pertanian secara bersama-sama untuk menghasilkan berbagai varietas pertanian.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1	Risa Yulandani. Pelaksanaan Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 <i>JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020</i>	Persamaan terletak pada sama-sama membahas mengenai pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan metode penelitian yang digunakan	Perbedaan mendasar pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian.
2	Willy Mulya Putri Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) Cahaya Kampung Tualang Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPPAAPKB) Kabupaten Siak Tahun 2016 <i>JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017</i>	Persamaan terletak pada sama-sama membahas mengenai kebijakan pemerintah dan metode penelitian yang digunakan sama-sama kualitatif	Perbedaan mendasar pada teori yang dilakukan dan lokasi penelitian.

1	2	3	4
3	Yuli Kurniyati, Fitri Rahmawati, dan Pulut Suryati Optimalisasi Pemanfaatan Dan Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat <i>Inotek, Volume 18, Nomor 1, Februari 2014</i>	Persamaan terletak pada sama-sama membahas mengenai optimalisasi	Perbedaan mendasar terletak pada metode penelitian yang digunakan.
4	Bayu Rohmatulloh, Dini Rochdiani, Dan Sudrajat Tingkat Partisipasi Anggota Dalam Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (Studi Kasus di KWT Mekar Wangi Desa Mekar Mulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis) <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH Volume 7, Nomor 1, Januari 2020 : 56 – 66</i>	Persamaan terletak sama-sama meneliti mengenai Kawasan Rumah Pangan Lestari	Perbedaan terletak pada konsep teori, dan lokasi penelitian

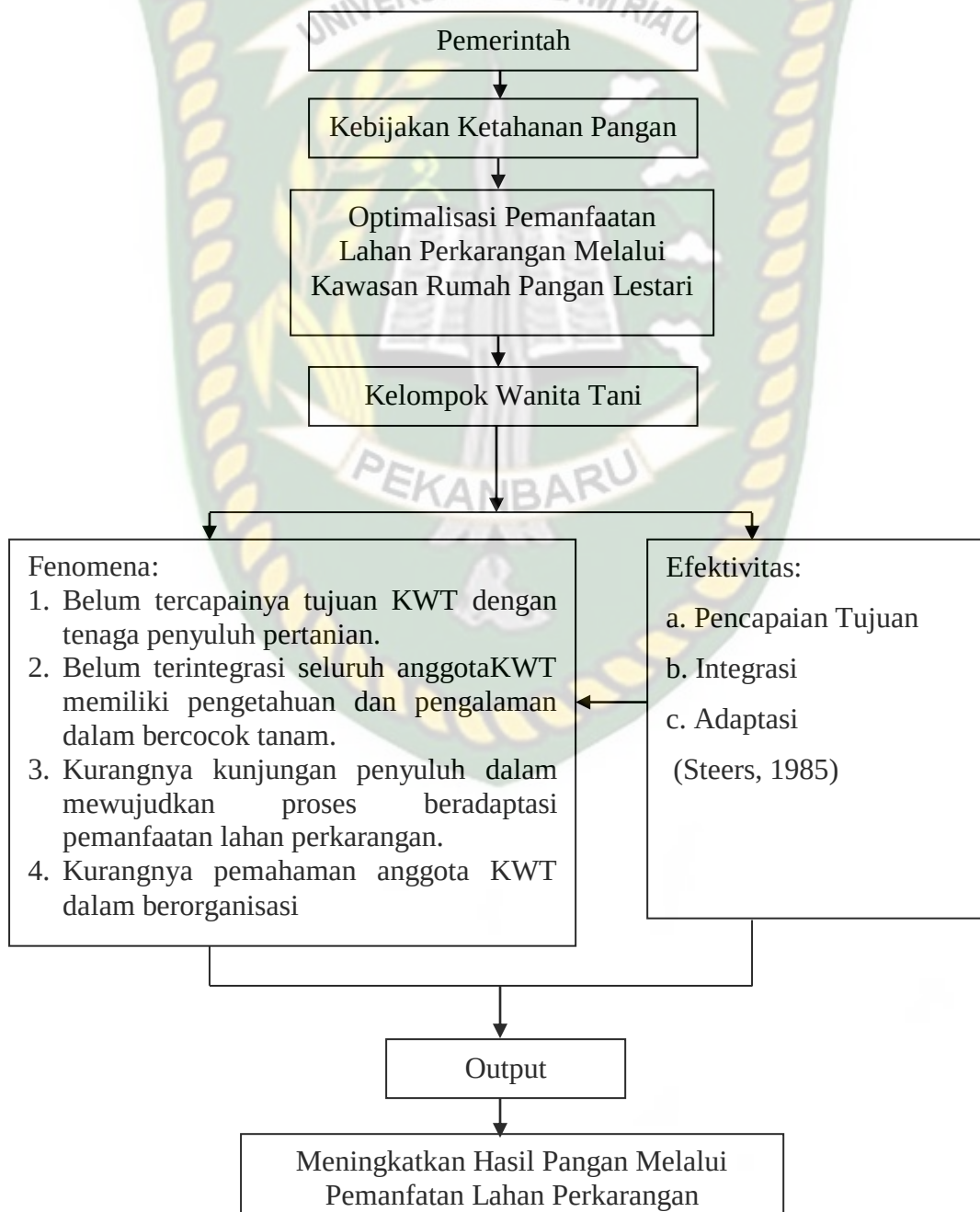
C. Kerangka Pikir

Kawasan Rumah Pangan Lestari salah satu program yang digulirkan pemerintah dalam upaya melakukan peningkatan ketahanan pangan di setiap wilayah Indonesia dengan memanfaatkan kelompok-kelompok tani wanita agar lebih efektif untuk memanfaatkan ruang yang ada di perkarangan rumah dan lainnya yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas pertanian. Kegiatan ini digulirkan pemerintah sejak tahun 2010 lalu, sehingga banyak kelompok-

kelompok tani wanita yang telah mendapatkan bantuan dan berhasil dalam mengelola ruang perkarangan sebagai sumber pangan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Tentang Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu



D. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang ditetapkan dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
- b. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat melalui program kegiatan pemanfaatan lahan perkarangan melalui kawasan rumah pangan lestari.
- c. Pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik program kegiatan pemanfaatan lahan perkarangan melalui kawasan rumah pangan lestari.
- d. Optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan melalui kawasan rumah pangan lestari adalah kebijakan yang digulirkan pemerintah dengan sasaran ketahanan pangan melalui pemberdayaan kelompok wanita tani.
- e. Kelompok Wanita Tani adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kelompok dengan jumlah terdiri 15 orang yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam mengikuti kegiatan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan.
- f. Indikator penelitian yang ditetapkan adalah
 1. Pencapaian tujuan dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan bidang ketahanan pangan melalui kegiatan KRPL dengan membentuk kelompok tani wanita. Indikator ini dilihat dari waktu pencapaian, sasaran program, dan dasar hukum kegiatan.

2. Integrasi dalam penelitian ini adalah komunikasi yang terjalin antara kelompok wanita tani dengan tenaga penyuluh pangan dalam memanfaatkan lahan perkarangan. Adapun indikator diukur dengan pelaksanaan prosedur dan sosialisasi.
3. Adaptasi dalam penelitian ini adalah kemampuan kerja sama yang ditunjukkan oleh kelompok wanita tani dan penyuluh pangan dalam memanfaatkan lahan perkarangan. Adapun indikator ini diukur dengan melihat peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan (Agustino, 2012;7)	Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	Pencapaian tujuan	a. Waktu pencapaian b. Sasaran c. Dasar hukum
		Integrasi	a. Prosedur pemanfaatan lahan perkarangan b. Sosialisasi pemanfaatan lahan perkarangan c. Komunikasi peningkatan pengetahuan kelompok wanita tani dalam pemanfaatan lahan perkarangan
		Adaptasi	a. Peningkatan kemampuan kelompok wanita tani dalam menghadapi masalah hama b. Peningkatan kemampuan kelompok wanita tani dalam memanfaatkan teknologi pertanian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini.

Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan, informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Sebagaimana dinyatakan Garna (1999:32) pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala yang didapatkan.

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena:

- a. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana pelaksanaan Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan hambatanya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.

- b. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Wanita Tani Kates Jingga di Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi ini disebabkan masih terdapat ketidaksepahaman antar anggota kelompok dalam menjalankan visi dan misi ketahanan pangan, sehingga target ketahanan pangan dari kelompok wanita tani di Kecamatan Seberida kurang tercapai sebagaimana diharapkan.

C. Informan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah informan utama dan informan tambahan.

- a. Informan utama terdiri dari Ketua Kelompok Wanita Tani.
- b. Informan tambahan yakni Tenaga Penyuluh Pangan dan Anggota Kelompok Wanita Tani.
- c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Kepala Desa Sibabat

D. Teknik Penetapan Informan

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012: 97) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang bertujuan. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pelaksanaan Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Informan utama adalah Ketua Kelompok Wanita Tani, Informan Anggota Kelompok Wanita Tani dan Tenaga Penyuluh Pangan Kecamatan Seberida, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Desa Sibabat dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian mengenai permasalahan penelitian yang telah ditetapkan yakni mengenai efektivitas dengan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Badan Pusat Statistik tentang Keadaan geografis lokasi penelitian.
2. Data Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Indragiri Hulu
3. Kebijakan Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2014:206) pengumpulan data adalah sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, di mana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk berupa mencari data sebanyak mungkin dari para informan, terutama informan utama.
- b. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Di mana observasi dilaksanakan untuk melihat aktivitas kelompok wanita tani di Kecamatan Seberida.

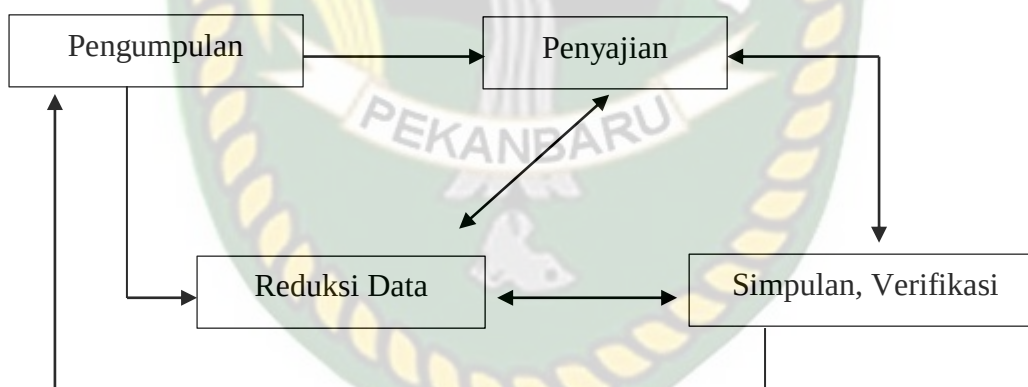
- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

Proses analisa data dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar III.1 : Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



(Miles dan Huberman, 2014:20)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (2014:16-19), yaitu:

1. Tahap pengumpulan data: peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.
2. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang tersusah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di kode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam

suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin

4. Menarik kesimpulan/verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Desa Sibabat

1. Sejarah Desa

Sibabat bermakna sei dan babat. Sei adalah sungai dan babat artinya membuka, jadi arti dari sibabat adalah desa yang dibuka keberadaannya posisinya di dekat sungai. Desa sibabat merupakan desa eks transmigrasi PIR UPT III Danau tiga yang penempatan warga transmigrasi dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1986 dan ditetapkan sebagai hari ulang tahun penempatan atau hari ulang tahun Desa Sibabat. Warga transmigrasi yang terdiri dari rombongan Jawa Barat yaitu Indramayu dan Cianjur dan rombongan dari Jawa Tengah yaitu Semarang dan Sragen, serta rombongan dari Jawa Timur yaitu Kediri dan Madura, selanjutnya dari rombongan AAPDT (lokal) wilayah sekitar Kelurahan Pangkalan Kasai.

Dengan berjalannya waktu pada tahun 1989 Desa Sibabat dinyatakan sebagai desa definitif oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk pertama kalinya mengadakan pemilihan kepala desa dan terpilih putra terbaik Desa Sibabat adalah Bapak Larno. Pada saat itu kondisi warga Desa Sibabat tergantung pada bantuan pemerintah (jatah hidup), bekerja sebagai perantau dan bekerja pada perkebunan karet Desa Sibabat dari tahun 1987 sampai tahun 1990.

Konversi atau penyerahan lahan kebun karet kepada petani peserta dilaksanakan pada bulan April tahun 1991, kondisi perekonomian masyarakat

mulai membaik dengan hasil kebun karet yang dimiliki 2 hektar setiap kepala keluarga.

2. Luas dan Batas Wilayah

Desa Sibabat yang berada di Kecamatan Seberida mempunyai luas wilayah 826 Ha, terdiri dari berbagai jenis peruntukan tanah meliputi lahan perkarangan seluas 126 Ha, lahan usaha 150 Ha, lahan kebun karet seluar 544 Ha, dan lahan fasilitas umum 6 Ha.

Secara administrasi Desa Sibabat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Titian Resak Kecamatan Seberida

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida.

3. Kependudukan dan Kependidikan

Hasil sensus pendudukan terakhir diketahui, bahwa jumlah penduduk Desa Sibabat 2.779 jiwa yang terdiri dari 1.486 laki-laki dan 1.293 perempuan. Sementara jumlah Kepala Keluarga sebanyak 750 KK. Penduduk Desa Sibabat tersebar di 5 Dusun yakni Dusun Berapit, Dusun Sibabat I, Dusun Sibabat II, Dusun Komplet C.11, dan Dusun Kompleks I.18.

Sampai saat ini tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang yang lebih tinggi, dengan hasil capaian pada tahun 2020 dapat diketahui tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sibabat berikut:

Tabel IV.1 Pendidikan Masyarakat

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	1.118
2	SLTP	628
3	SLTA	804
4	Diploma	36
5	Sarjana (S-1 dan S-2)	23

Sumber: Kantor Kepala Desa Sibabat, 2020.

4. Mata Pencapaian

Secara umum mata pencapaian warga masyarakat Desa Sibabat dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang yaitu mata pencapaian, seperti petani, buruh tani, peternak dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Mata Pencapaian Penduduk

No.	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah
1	Pensiunan	3
2	PNS	15
3	TNI/Polri	2
4	Petani/Pekebun	790
5	Buruh/Perkebunan	225
6	Pegawai Swasta	34
7	Wiraswasta	52
8	Mekanik/Supir	10
9	IRT	750
10	Belum bekerja	80
11	Pelajar/Mahasiswa	513
12	Tukang	10
13	Bidan/Perawat/Dosen	5
14	Lain-lain	120
	Jumlah	2.779

Sumber: Kantor Desa Sibabat, 2021.

B. Profil KWT Kates Jingga

Kelompok Wanita Tani Kates Jingga merupakan salah satu kelompok wanita tani yang sudah terbentuk pada tahun 2013 dan mengalami perubahan atau benah kelompok pergantian kepengurusan pada tahun 2017. KWT Kates Jingga telah terdaftar di Dinas dan bergerak pada pengembangan budi daya hortikultura (Budidaya sayuran) yang anggota terdiri dari wanita tani.

KWT Kates Jingga beralamat di RT 11 RW 05 Dusun Sibabat II Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini KWT Kates Jingga diketuai oleh ibu Jamin dengan 29 orang anggota lainnya. Dengan struktur organisasi yang telah disusun sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi KWT Kates Jingga



Sumber: KWT Kates Jingga, 2021.

Kegiatan KWT Kates Jingga dalam menjalankan aktivitas sebagai kelompok tani adalah:

- a. Pembuatan kebun bibit

- b. Pemanfaatan perkarangan anggota kelompok
- c. Pembuatan Demplot
- d. Pembuatan kebun sekolah
- e. Pengolahan hasil perkarangan dengan konsep B2SA.

Dalam menjalankan aktivitas KWT Kates Jingga menanam berbagai jenis tanaman sayuran dan buahan. Di mana jenis sayuran yang ditanam disesuaikan dengan keadaan cuaca dan berdurasi pendek yakni 1-3 bulan seperti bayam, kangkung, sawi, dan jenis sayuran lainnya. Sementara untuk usia 1-6 bulan KWT Kates Jingga bercocok tanam cabe dan terung. Kemudian untuk jenis buahan yang masa usianya lebih dari 1 tahun yakni pepaya (kates) dan pisang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Identitas informan penelitian digambarkan pada penelitian ini sebagai salah satu bentuk keakurasian data informasi yang diperoleh dari lapangan. Di mana penjabaran identitas informan sangat perlu sebagai bentuk keabsahan dari hasil penelitian yang diperoleh dan dengan sumber informasi yang diperoleh dari orang-orang yang benar-benar memahami permasalahan yang diteliti.

Adapun gambaran identitas informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1	Firda Yanti	46	Perempuan	S-1	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
2	Tarsuwi	52	Laki-laki	S-1	Penyuluh Pertanian
3.	Isnaini Ulfah	34	Perempuan	S-1	Ketua PKK
4.	Jamini	52	Perempuan	SMA	Ketua KWT Kates Jingga
5.	Ngatmi	54	Perempuan	SD	Anggota KWT Kates Jingga
6.	Fatkhurrozaq	48	Laki-laki	S-1	Pj. Kepala Desa Sibabat

Sumber: Olahan Penelitian, 2021

Dari tabel identitas informan di atas jelalah bahwa informasi dari penelitian ini diperoleh dari 6 orang yang dianggap mampu memberikan informasi dan mengerti akan permasalahan yang diteliti. Informan yang ditemui pada

penelitian ini adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan permasalahan yang diteliti dan memahami permasalahan. Di mana dari segi usia para informan berada pada rentang usia 34 – 54 tahun, sehingga dapat dikatakan informan merupakan orang-orang yang masih produktif dan berpengalaman pada bidangnya. Sementara dari jenis kelamin telah terwakili dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari segi pendidikan, para informan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari terendah berpendidikan SD dan tertinggi sarjana Strata Satu (S-1).

Seluruh informan penelitian diwawancara secara langsung, sehingga diperoleh beragam informasi sesuai permasalahan. Di mana para informan terdiri dari berbagai pihak yakni pemerintah desa, instansi terkait dari Dinas Ketahanan Pangan, tenaga penyuluh, dan dari KWT Kates Jingga yang menjadi objek utama permasalahan penelitian yang diangkat.

B. Analisis Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang dan papan. Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 yang menekankan adanya pemenuhan pangan di tingkat individu dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal sehingga tercapai ketahanan dan kemandirian pangan. Pemenuhan pangan pada tingkat individu diselenggarakan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan.

Lahan pekarangan diartikan sebagai tanah sekitar perumahan, kebanyakan berpagar keliling dan biasanya ditanami tanaman dengan beraneka macam tanaman semusim maupun tahunan yang dapat di pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan diperdagangkan (Mardianto dan Sutami. 1982). Lahan pekarangan dapat menjadi salah satu sumber pangan keluarga yang relatif murah dan mudah dimanfaatkan. Meskipun pemanfaatan lahan pekarangan hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan, pekarangan sangat berperan dalam mendukung kehidupan sosial ekonomi rumah tangga, khususnya rumah tangga petani.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan keluarga sangat ditentukan dari peran wanita tani sebagai ibu rumah tangga. Dengan adanya Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan nantinya mampu mencukupi kebutuhan anggota kelompok dan masyarakat sekitar agar terciptanya ketahanan pangan.

Pemanfaatan lahan pekarangan memang selama ini sudah dilakukan kelompok wanita tani Kates Jingga secara swadaya, namun hal ini belum memberikan kontribusi yang cukup untuk kebutuhan dan pendapatan keluarga kelompok tani, dikarenakan masih kurang optimalnya dalam pengelolaan lahan pekarangan rumah oleh kelompok dalam pemenuhan kebutuhan akan pangan. Perlu ditumbuh kembangkan pemanfaatan pekarangan secara optimal dengan mengimplementasikan Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) agar seluruh anggota keluarga pada

kelompok wanita tani serta masyarakat Desa Sibabat dapat memenuhi kebutuhan akan pangan yang beragam dan bergizi dengan memanfaatkan pekarangan rumah sehingga terciptanya ketahanan pangan keluarga yang menjadi dasar untuk menciptakan ketahanan pangan Nasional.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan bidang ketahanan pangan melalui kegiatan KRPL dengan membentuk kelompok tani wanita (KWT). Indikator ini dilihat dari waktu pencapaian, sasaran program, dan dasar hukum kegiatan.

a. Waktu Pencapaian

Waktu pencapaian dalam penelitian ini adalah waktu yang ditetapkan oleh pemerintah kepada setiap kelompok penerima bantuan pada program KRPL untuk melaksanakan aktivitas kelompok sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Firda Yanti dikatakan mengenai waktu pencapaian bahwa:

Kalau untuk APBD itu 2 tahun tergantung dari pusat (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa KWT Kates Jingga telah mendapatkan bantuan kegiatan KRPL selama 2 tahun berturut-turut dengan maksud terwujudnya pemahaman dan pengembangan kelompok dalam menjalankan aktivitas pertanian dalam skala kecil dengan memanfaatkan ruang-ruang yang telah disiapkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Tarsuwi diketahui informasi mengenai waktu pencapai berikut:

Program ini berawal dari tahun 2013. KWT memperoleh dana realisasi tahun 2018 tahap I sejumlah Rp. 50.000.000,- tahun 2019 tahap II sebesar Rp. 15.000.000,- (Wawancara pada tanggal 27 April 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa bantuan program KRPL yang pernah diterima KWT Kates Jingga yakni sebanyak 2 kali pada tahun 2018 dan 2019, sehingga dari segi bantuan pendanaan KWT Kates Jingga telah dibantu oleh pemerintah daerah. Dana yang diperoleh dipergunakan untuk mempersiapkan lahan, pelatihan meningkatkan keterampilan anggota, dan pembelian bibit, serta perawatan/pemeliharaan tanaman yang ditanam.

Wawancara dengan Ibu Isnaini Ulfa diperoleh informasi mengenai waktu pencapai berikut:

3 (tiga) bulan tergantung dari desanya atau peluangnya dari desa bagaimana kebutuhannya. Agresif dalam bantuan dan kalau untuk bantuan 6 bulan (Wawancara pada tanggal 30 Mei 2021)

Informasi di atas memaparkan tentang waktu bantuan yang diterima KWT bisa dimanfaatkan dalam kurun waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Dengan rentang waktu yang ada, KWT Kates Jingga bisa berusaha dengan maksimal untuk memanfaatkan dengan baik melalui pemberian hasil tanaman atau bercocok tanam dengan baik. Adanya rentang waktu ini untuk memperlihatkan keseriusan dari anggota kelompok dalam menjalankan aktivitas pertanian atau berkebun dalam skala kecil dan mampu memberikan hasil.

Wawancara dengan Ibu Jamini selaku ketua KWT Kates Jingga berikut ini:

Waktunya ditetapkan selama 3 (tiga) bulan (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Pada ingin menerima bantuan dari pemerintah, KWT Kates Jingga diberikan waktu selama 3 bulan untuk membuktikan keseriusannya dalam mengikuti program KRPL. Di mana waktu yang digunakan mulai dari persiapan anggota, pengadaan lahan yang disahkan kepala desa, sampai dengan pengajuan atau permohonan kepada pemerintah melalui tenaga penyuluh yang ada, dan lain-lainnya. Waktu untuk menjalankan program KRPL pun ditetapkan dalam kurun 3 – 6 bulan, sehingga KWT Kates Jingga harus serius dalam menjalankan program tersebut.

Sementara dari hasil wawancara dengan Ibu Ngatmi salah seorang anggota KWT Kates Jingga diperoleh informasi yakni:

Waktunya lebih kurang 3 bulan (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan program KRPL adalah 3 bulan. Di mana dalam rentang 3 bulan tersebut, kegiatan KRPL harus sudah berjalan dan melibatkan seluruh anggota kelompok dengan memanfaatkan semua ruang yang telah ditetapkan sebagai lahan untuk bercocok tanam.

Hasil observasi yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa untuk mendapatkan bantuan program KRPL dari pemerintah dan melaksanakan programnya KWT Kates Jingga diberikan waktu antara 3 – 6 bulan. Di mana proses pengurusan mulai dari permohonan sampai pada pencairan dana bantuan

dibutuhkan waktu 3 bulan. Sedangkan penggunaan dana yang telah terima untuk dijalankan sesuai dengan permohonan yang direncanakan yakni 3 – 6 bulan. Dengan demikian waktu pencapaian dari program KRPL mulai dari pengajuan permohonan, pencairan bantuan, pelaksanaan kegiatan setidaknya memakan waktu 9 bulan. Waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dimanfaatkan oleh KWT Kates Jingga untuk bercocok tanam sayur-sayuran yang berusia pendek dan berusia menengah, serta menanam sayuran/buahan yang memiliki masa usia di atas 1 tahun. Di karena nama kelompok yang telah diberikan Kates Jingga, maka seluruh anggota kelompok bersepakat untuk menanam pepaya (kates) sebagai icon dari KWT tersebut.

Berdasarkan dari tanggapan yang disampaikan informan di atas sangat jelas terlihat bahwa dalam pelaksanaan program KRPL yang dijalankan KWT Kates Jingga Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan sasaran pencapaian program yakni 3 bulan sampai 6 bulan. Namun pencapaian dari program tersebut belum dapat dipenuhi secara maksimal, dikarenakan perlunya bimbingan dari penyuluh pertanian untuk mendapatkan hasil yang baik.

b. Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah sasaran yang diharapkan dari bantuan program KRPL yang diterima oleh kelompok wanita tani. Di mana sasaran paling utama adalah memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar masyarakat untuk berdaya guna dan memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Firda Yanti dikatakan mengenai sasaran bahwa:

Meningkatkan ketersediaan aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam berarti seimbang dan aman. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa sasaran yang diharapkan dari program KRPL adalah untuk meningkatkan ketersediaan aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam berarti seimbang dan aman. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Salah satu penerima bantuan dan diharapkan mampu untuk mewujudkan sasaran dari program KRPL ini adalah KWT Kates Jingga.

Hasil wawancara dengan Bapak Tarsuwi diketahui informasi mengenai sasaran:

Meningkatkan ekonomi keluarga bagi pelaku usaha tani, gizi keluarga. Meningkatkan sikap pengetahuan dan keterampilan terhadap pemanfaatan lahan perkarangan. (Wawancara pada tanggal 27 April 2021)

Tanggapan di atas memberikan gambaran bahwa sasaran dari program KRPL yang diterima KWT Kates Jingga adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan meningkatkan gizi masyarakat. Di mana untuk mencapai sasaran tersebut salah satu langkahnya adalah dengan memanfaatkan lahan perkarangan yang tidak termanfaatkan bagi di lingkungan rumah tinggal maupun di lingkungan sekitarnya.

Wawancara dengan Ibu Isnaini Ulfa selaku ketua KWT Kates Jingga diperoleh informasi berikut:

Untuk ibu-ibu dengan adanya KWT jadi ada kegiatan dari kegiatan utama. Untuk menambah penghasilan KWT dan bisa membantu untuk keluarga (Wawancara pada tanggal 30 Mei 2021)

Sasaran utama dari kegiatan KRPL adalah meningkatkan perekonomian keluarga melalui pertanian. Di mana program ini ditujukan untuk ibu-ibu yang sehariannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga bisa memanfaatkan waktu luang untuk bercocok tanam secara mandiri maupun berkelompok. Adanya program ini sangat bermanfaat dalam memberdayakan masyarakat dan memanfaatkan lahan perkarangan yang terabaikan.

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Jamini selaku ketua KWT Kates Jingga berikut ini:

Meningkatkan ekonomi keluarga bagi kelompok wanita tani berdasarkan kemandirian kelompok (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Wawancara dengan Ibu Ngatmi salah seorang anggota KWT Kates Jingga diperoleh informasi yakni:

Meningkatkan ekonomi keluarga serta pengetahuan dan keterampilan terhadap pemanfaatan lahan perkarangan (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Hadirnya program KRPL ini memberi peluang kepada ibu-ibu rumah tangga untuk membentuk kelompok wanita tani dengan memanfaatkan lahan-lahan perkarangan sebagai lahan bercocok tanam. KWT Kates Jingga hadir untuk

melaksanakan program KRPL, dikarenakan program ini memiliki sasaran untuk meningkatkan perekonomian atau menambah ekonomi keluarga. Selain itu program KRPL membentuk wanita-wanita tani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bercocok tanam.

Hasil observasi yang telah dilakukan terlihat bahwa program KRPL yang diterima KWT Kates Jingga mampu membentuk wanita tani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bercocok tanam. Anggota KWT Kates telah melaksanakan program KRPL, namun sasaran utamanya untuk meningkatkan perekonomian keluarga belum terwujud dikarenakan terbatasnya hasil pertanian yang dihasilkan. Untuk jangka panjang pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki anggota KWT ini bisa dikembangkan untuk meningkatkan hasil pertanian yang mampu menopang perekonomian.

Berdasarkan dari tanggapan yang disampaikan informan di atas sangat jelas terlihat bahwa dalam pelaksanaan program KRPL yang dijalankan KWT Kates Jingga Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan sasaran pencapaian program adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun sampai saat ini hasil KWT Kate Jingga belum mampu meningkatkan perekonomian kelompoknya dikarenakan pengelolaan KRPL belum sungguh-sungguh dijalankan.

c. Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan landasan yang menjadi acuan terwujudnya program KRPL. Dasar hukum utama dari program ini adalah undang-undang

tentang ketahanan pangan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, maka perlu melibatkan seluruh elemen tidak terkecuali kelompok tani wanita.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Firda Yanti dikatakan mengenai dasar hukum bahwa:

Orang pertanian yang memasukan atau mengusulkan pemanfaatan lahan perkarangan. (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)

Landasan hukum yang jelas untuk program KRPL membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Di mana pemerintah daerah melalui bidang pertanian mengusulkan pemanfaatan lahan masyarakat sebagai program yang bisa melibatkan banyak pihak tidak terkecuali kelompok wanita tani.

Hasil wawancara dengan Bapak Tarsuwi diketahui informasi :

Berdasarkan kebersamaan kemandirian kelompok. (Wawancara pada tanggal 27 April 2021)

Kelompok Wanita Tani yang dibentuk didasarkan dari adanya kebersamaan untuk mencapai tujuan. Di mana masing-masing kelompok bersepakat untuk melaksanakan program KRPL dan mewujudkan ketahanan pangan di tengah-tengah masyarakat.

Wawancara dengan Ibu Isnaini Ulfa mengenai dasar hukum diperoleh informasi berikut:

Menurut undang-undang yang ada (Wawancara pada tanggal 30 Mei 2021)

Dasar hukum terbentuknya program KRPL adalah peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui undang-undang tersebut program KRPL dilaksanakan dan salah satunya melibatkan masyarakat sebagai sasaran dalam mewujudkan ketahanan pangan. KWT Kates Jingga salah satu kelompok yang terbentuk berlandaskan dari undang-undang ketahanan pangan tersebut.

Hasil observasi yang penulis perhatikan bahwa program KRPL yang dilaksanakan sejak tahun 2013 lalu merupakan salah satu implementasi dari undang-undang ketahanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam mencapainya. KWT Kates Jingga dibentuk atau didirikan berdasarkan ketentuan yang ada untuk mengambil peran dalam meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat.

Berdasarkan dari tanggapan yang disampaikan informan di atas sangat jelas terlihat bahwa dalam pelaksanaan program KRPL yang dijalankan KWT Kates Jingga Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan memiliki dasar hukum yang jelas. Namun pencapaian dari program tersebut belum dapat dipenuhi secara maksimal, dikarenakan perlunya bimbingan dari penyuluh pertanian untuk mendapatkan hasil yang baik.

Adapun jenis tanaman dan usia tanaman yang ditanam oleh anggota KWT Kates Jingga pada lahan-lahan perkarangan yang tersedia yakni berikut ini:

Tabel V.2 Jenis dan Usia Tanaman pada KWT Kates Jingga

No.	Kategori	Jenis Tanaman	Usia
1	Tanaman Pendek	1. Sawi 2. Kangkung 3. Bayam 4. Daun Seledri 5. Daun Bawang	1 – 3 bulan
2	Tanaman Menengah	1. Terong 2. Kacang Panjang 3. Pare 4. Timun 5. Tomat 6. Cabe	3 – 6 bulan
3	Tanaman Panjang	1. Ubi kayu 2. Pepaya 3. Pisang 4. Jahe, Kencur, Kunyit	Lebih dari 6 bulan

Sumber: Olahan Penelitian, 2021.

Temuan penelitian dari indikator pencapaian tujuan dari beberapa dimensi yang ditetapkan. Di mana waktu pencapaian program KRPL mulai dari pengajuan permohonan dan pencairan serta pelaksanaan lapangan hingga memperoleh hasil berada pada kisaran waktu 3-6 bulan, dengan rentang waktu yang tersedia tidak seluruh hasil tanaman mampu dihasilkan dikarenakan adanya beberapa jenis tanaman berusia pendek dan berusia panjang. Kemudian dari dimensi sasaran yang hendak dicapai yakni meningkatkan perekonomian keluarga, pengetahuan, dan keterampilan dari anggota KWT, belum sepenuhnya mampu dicapai. Sementara dasar hukum dalam pelaksanaan KRPL yang diterima KWT Kates Jingga sangat jelas yakni berpedomankan dari undang-undang ketahanan pangan. Dengan demikian sangat jelas bahwa indikator dari pencapaian tujuan pada penelitian ini dapat dikatakan sudah terlaksana.

2. Integrasi

Integrasi dalam penelitian ini adalah komunikasi yang terjalin antara kelompok wanita tani dengan tenaga penyuluh pangan dalam memanfaatkan lahan perkarangan. Adapun indikator diukur dengan pelaksanaan prosedur dan sosialisasi

a. Prosedur pemanfaatan lahan perkarangan

Prosedur pemanfaatan lahan adalah langkah yang digunakan KWT Kates Jingga dalam menjalankan aktivitas pertanian dengan menggunakan lahan yang tersedia di sekitarnya. Dengan demikian pemanfaatan lahan perkarangan harus melalui proses atau prosedur yang ditetapkan, sehingga lahan perkarangan bisa dimanfaatkan untuk dijadikan lahan pertanian.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Firda Yanti dikatakan mengenai prosedur pemanfaatan lahan perkarangan bahwa:

Mengajukan proposal ke Dinas Ketahanan Pangan, di tanda tangani oleh ketua kelompok, kepala desa, dan penyuluh pertanian di kecamatan. Isi proposal tentang pengajuan aneka sayur-sayuran, pupuk, dan pestisida serta rumah bibit. (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)

Tanggapan di atas sangat jelas menggambarkan bahwa prosedur dalam memanfaatkan lahan perkarangan harus melalui pengajuan proposal ke Dinas Ketahanan Pangan, di tanda tangani oleh ketua kelompok, kepala desa, dan penyuluh pertanian di kecamatan. Isi proposal tentang pengajuan aneka sayur-sayuran, pupuk, dan pestisida serta rumah bibit. Seluruh berkas yang diajukan

terutama pada bagian lahan yang digunakan harus memiliki kepastian hukum yakni persetujuan pemilik lahan untuk bisa dimanfaatkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Tarsuwi diketahui informasi sebagai berikut:

Teknik budi daya, rumah bibit, demplot (demonstrasi plot), dan perkarangan anggota (Wawancara pada tanggal 27 April 2021).

Lahan perkarangan yang telah ditetapkan sebagai lokasi untuk bercocok tanam dari KWT Kates Jingga harus dimanfaatkan untuk dilaksanakan teknik budi daya, pembuatan rumah bibit, demplot, dan lainnya yang bisa mendukung aktivitas kelompok. Seluruh lahan yang telah diajukan harus memiliki dasar hukum yang jelas atau hak guna pakai agar tidak terjadi permasalahan pada saat pelaksanaan aktivitas bercocok tanam di mulai.

Wawancara dengan Ibu Isnaini Ulfa mengenai proses pemanfaatan lahan perkarangan diperoleh informasi berikut:

Lahan perkarangan umum. Memadai (lahan memadai/ cukup tidak terlalu sempit untuk dibagi ke beberapa kelompok tani). (Wawancara pada tanggal 30 Mei 2021)

Lahan bercocok tanam yang digunakan KWT Kates Jingga merupakan lahan yang tidak termanfaatkan untuk aktivitas lainnya, sehingga pelaksanaan program KRPL yang dijalani dapat berjalan dengan maksimal. Di mana beragam lahan yang bisa dimanfaatkan baik milik pribadi anggota kelompok maupun milik pemerintah desa ataupun milik masyarakat lainnya yang bersedia untuk digunakan untuk aktivitas program KRPL.

Wawancara dengan Ibu Jamini selaku ketua KWT Kates Jingga berikut ini:

Teknik budi daya, rumah bibit, perkarangan anggota. (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Wawancara dengan Ibu Ngatmi salah seorang anggota KWT Kates Jingga diperoleh informasi yakni:

Rumah bibit, demplot, lahan perkarangan. (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pemanfaatan lahan perkarangan yang digunakan KWT Kates Jingga sebagai tempat beraktivitas anggota kelompok dalam bercocok tanam. Adapun penggunaan lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah bibit, demplot, teknik budi daya dan lainnya. Dengan adanya langkah ini mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada seluruh anggota kelompok yang tergabung pada KWT Kates Jingga, sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarganya.

Hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa proses pemanfaatan lahan perkarangan dimulai dari adanya persetujuan atau perizinan secara tertulis dari pemilik lahan. Kemudian setelah adanya perizinan atau persetujuan tersebut lahan-lahan yang ditetapkan bisa dimanfaatkan untuk beragam aktivitas bercocok tanam. Hal inilah yang telah dilakukan KWT Kates Jingga dalam menjalankan aktivitasnya untuk mendukung ketahanan pangan di lingkungan masyarakat.

b. Sosialisasi pemanfaatan lahan perkarangan

Sosialisasi pemanfaatan lahan perkarangan adalah sosialisasi yang disampaikan tenaga penyuluh pertanian kepada anggota kelompok untuk memanfaatkan semua ruang lahan yang ada dan diolah agar bisa menghasilkan produk sayuran.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Firda Yanti dikatakan mengenai sosialisasi pemanfaatan lahan perkarangan bahwa:

Meningkatkan ketersediaan aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Meningkatkan kesadaran peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar. (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa meningkatkan ketersediaan aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Meningkatkan kesadaran peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar.

Hasil wawancara dengan Bapak Tarsuwi diketahui informasi sebagai berikut ini:

Optimalisasi lahan perkarangan melalui konsep KRPL (Wawancara pada tanggal 27 April 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan tenaga penyuluh pertanian adalah untuk memanfaatkan secara maksimal lahan perkarangan yang tersedia agar berdaya guna dalam bercocok tanam. Hal ini merupakan konsep yang ditetapkan dalam KRPL untuk memanfaatkan lahan-lahan yang terabaikan menjadi produktif.

Wawancara dengan Ibu Isnaini Ulfa mengenai sosialisasi pemanfaatan lahan perkarangan diperoleh informasi berikut:

Sosialisasi langsung ke anggota KWT. Mensosialisasikan bagaimana memanfaatkan lahan, memulai membuka lahan kosong, dicangkul sampai ditanami sayuran. (Wawancara pada tanggal 30 Mei 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan tenaga penyuluh pertanian berupa sosialisasi langsung ke anggota KWT. Tenaga penyuluh melakukan sosialisasi bagaimana untuk memanfaatkan lahan, memulai membuka lahan kosong, dicangkul sampai ditanami sayuran. Kemudian sosialisasi lainnya yang mendukung berjalannya program KRPL yang dijalankan KWT.

Wawancara dengan Ibu Jamini selaku ketua KWT Kates Jingga berikut ini:

Tatap muka, penyuluhan, pelatihan (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Wawancara dengan Ibu Ngatmi salah satu anggota KWT Kates Jingga diperoleh informasi yakni:

Kumpulan antara kelompok wanita tani dengan instansi berwenang
(Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Tanggapan menggambarkan sosialisasi yang dilakukan tenaga penyuluh kepada anggota KWT Kates Jingga adalah dengan melakukan sosialisasi langsung berupa tatap muka pada saat penyuluhan dan pelatihan. Kemudian sosialisasi tidak langsung melalui komunikasi menggunakan media handphone.

Hasil observasi terlihat bahwa dalam melakukan sosialisasi tenaga penyuluh pertanian telah melaksanakan secara langsung kepada anggota KWT baik berupa sosialisasi, penyuluhan, maupun pelatihan, serta kunjungan rutin. Kemudian melakukan sosialisasi dengan menggunakan media komunikasi telepon untuk menyampaikan berbagai hal kepada ketua kelompok mengenai program KRPL.

Dengan demikian jelaslah bahwa sosialisasi pemanfaatan lahan perkarangan telah dilaksanakan oleh penyuluh pertanian dan juga ketua kelompok KWT kepada seluruh anggotanya.

c. Komunikasi peningkatan pengetahuan KWT dalam pemanfaatan lahan perkarangan

Komunikasi peningkatan pengetahuan KWT dalam pemanfaatan lahan perkarangan adalah langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seluruh anggota kelompok dalam melaksanakan program KRPL dengan memanfaatkan lahan perkarangan untuk bercocok tanam.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Firda Yanti dikatakan mengenai komunikasi peningkatan pengetahuan KWT bahwa:

Pembinaan langsung ke kelompok KWT (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)

Langkah yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan untuk menjalin komunikasi dengan anggota KWT adalah melakukan pembinaan langsung dengan cara mendatangi langsung anggota kelompok yang telah menerima bantuan program KRPL. Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan jalinan komunikasi dengan seluruh elemen pengurusan KWT, sehingga pembinaan yang dilakukan tidak menerima hambatan dari segi komunikasi

Hasil wawancara dengan Bapak Tarsuwi diketahui informasi tentang komunikasi peningkatan pengetahuan KWT:

Penyuluhan, demonstrasi cara (demcar), dan demonstrasi plot (demplot)
(Wawancara pada tanggal 27 April 2021)

Adapun langkah komunikasi yang dilakukan adalah melalui penyuluhan, melakukan demonstrasi cara bercocok tanam dan menggunakan peralatan serta mengatasi hama yang menyerang tanaman. Kemudian melakukan demonstrasi demplot. Hasil ini menggambarkan bahwa telah ada komunikasi yang dilakukan Dinas melalui tenaga penyuluh lapangan untuk memberikan beragam informasi kepada KWT, sehingga dapat dikatakan komunikasi antara pemerintah dengan KWT telah ada.

Wawancara dengan Ibu Isnaini Ulfa diperoleh informasi tentang komunikasi peningkatan pengetahuan KWT berikut:

Diadakan sosialisasi langsung di lapangan yang dilakukan oleh PPL antar kelompok. Diadakan penyuluhan atau bimtek kepada anggota KWT supaya mereka mengetahui bagaimana pemanfaatan yang benar (Wawancara pada tanggal 30 Mei 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa Diadakan sosialisasi langsung di lapangan yang dilakukan oleh PPL antar kelompok. Diadakan penyuluhan atau bintek kepada anggota KWT supaya mereka mengetahui bagaimana pemanfaatan yang benar. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyamai persepsi antar anggota kelompok, sehingga pelaksanaan program KRPL yang digeluti KWT dapat berjalan dengan baik.

Wawancara dengan Ibu Jamini mengenai komunikasi peningkatan pengetahuan KWT berikut ini:

Secara lisan (tatap muka) dan melalui handphone (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Wawancara dengan Ibu Ngatmi diperoleh informasi mengenai komunikasi peningkatan pengetahuan KWT yakni:

Kumpulan bersama dan tatap (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa komunikasi yang terjalin antar KWT Kates Jingga dengan pemerintah maupun dengan tenaga penyuluh pertanian adalah melalui tatap muka langsung dan melalui komunikasi dengan menggunakan media handphone.

Hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa telah ada komunikasi yang terjalin antara pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Tenaga

penyuluh pertanian dengan KWT Kates Jingga, sehingga semua aktivitas yang ada di kelompok terutama pada bercocok tanam tidak terlepas dari komunikasi yang terbentuk.

Berdasarkan dari tanggapan yang disampaikan informan di atas sangat jelas terlihat bahwa dalam pelaksanaan program KRPL yang dijalankan KWT Kates Jingga Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan memiliki program yang jelas. Namun pada pelaksanaan KRPL yang dijalankan KWT Kates Jingga belum mencapai rencana yang diharapkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Temuan pada indikator integrasi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa telah ditetapkan prosedur pemanfaatan lahan perkarangan dari pemerintah daerah dan disepakati anggota KWT. Telah dilaksanakan sosialisasi pemanfaatan lahan perkarangan oleh tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL kepada anggota KWT dalam berbagai hal yang sesuai dengan program KRPL. Adanya komunikasi yang terhubung antara pemerintah dengan anggota KWT, sehingga berbagai informasi pelaksanaan KRPL terus diperbaharui. Dengan demikian jelaslah bahwa telah ada integrasi antara pemerintah dengan KWT dalam program optimalisasi lahan perkarangan yang ada di Indragiri Hulu.

3. Adaptasi

Adaptasi dalam penelitian ini adalah kemampuan kerja sama yang ditunjukkan oleh kelompok wanita tani dan penyuluh pangan dalam

memanfaatkan lahan perkarangan. Adapun indikator ini diukur dengan melihat peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

a. Masalah Hama

Masalah hama merupakan masalah yang harus dipahami pelaku pertanian, agar tanaman yang diusahakannya terbebas dari hama dan memberikan hasil tanaman yang maksimal.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Firda Yanti dikatakan mengenai masalah hama bahwa:

Berkoordinasi dengan penyuluh pertanian yang ada di desa yang bersangkutan (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)

Tanggapan di atas memberikan gambaran bahwa KWT Kates Jingga telah berkoordinasi dengan tenaga penyuluh yang bertugas di wilayah tersebut, sehingga berbagai persoalan dalam menjalankan program pertanian yang digeluti KWT dapat ditanyai secara langsung dan dapat dicari jalan keluarnya terutama masalah hama yang mengganggu tanaman.

Hasil wawancara dengan Bapak Tarsuwi diketahui informasi tentang masalah hama:

Mampu mengidentifikasi hama. Mampu mengidentifikasi hama secara hayati (pestisida nabati) (Wawancara pada tanggal 27 April 2021)

Anggota KWT Kates Jingga yang terus mengikuti berbagai penyuluhan dan pembinaan dari pemerintah maupun dari tenaga penyuluh setidaknya telah mampu mengidentifikasi hama yang mengganggu tanaman. Setelah mengetahui hama

pengganggu langkah berikutnya melakukan pembasmian hama dengan cara-cara yang telah dipelajari dari tenaga penyuluh.

Wawancara dengan Ibu Isnaini Ulfa mengenai masalah hama diperoleh informasi berikut:

Melakukan penyemprotan dengan melihat jenis hama. Menggunakan jaring atau pagar dan bisa juga digunakan pagar tanaman hidup (Wawancara pada tanggal 30 Mei 2021)

Wawancara dengan Ibu Jamini selaku ketua KWT Kates Jingga berikut ini:

Dengan cara penyemprotan, pengendalian hama dengan bahan organik, pengendalian hama dengan pemagaran. (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Wawancara dengan Ibu Ngatmi salah seorang anggota KWT Kates Jingga diperoleh informasi yakni:

Penyemprotan obat hama (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Hasil tanggapan yang disampaikan beberapa informan di atas memberikan penjelasan bahwa telah adalah koordinasi dalam mengatasi masalah hama. Di mana terjalin koordinasi dengan penyuluh pertanian yang ada di desa yang bersangkutan. KWT Kates Jingga mampu mengidentifikasi hama. Mampu mengidentifikasi hama secara hayati (pestisida nabati). Melakukan penyemprotan dengan melihat jenis hama. Menggunakan jaring atau pagar dan bisa juga digunakan pagar tanaman hidup. Dengan cara penyemprotan, pengendalian hama dengan bahan organik, pengendalian hama dengan pemagaran.

Hasil observasi ditemukan bahwa dalam mengidentifikasi masalah hama para anggota kelompok tani sebagian besar sudah mampu mengetahuinya dan memiliki cara untuk mengatasinya. Adapun hama yang ditemukan yakni hama babi, tikus, dan hama kupu-kupu putih, dan jenis hama lainnya yang bersifat musiman. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan pemagaran tanaman dan juga penyemprotan pestisida pada tanaman.

Dengan demikian jelaslah bahwa mengatasi masalah hama dalam bercocok tanam merupakan masalah yang harus terus dipahami, sehingga hasil bercocok tanam menjadi maksimal. Pada penelitian KWT Kates Jingga telah mendapatkan pengetahuan mengatasi masalah hama yang selalu disampaikan oleh tenaga penyuluh pertanian.

b. Pemanfaatan teknologi pertanian

Pemanfaatan teknologi pertanian adalah langkah yang digunakan untuk mempermudah dalam bidang pertanian dan membantu menghasilkan hasil pertanian yang lebih maksimal.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Firda Yanti dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi pertanian berikut:

Dengan melihat di youtube dan juga berkonsultasi dengan penyuluh karena penyuluh yang membina (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Tarsuwi diketahui informasi pemanfaatan teknologi pertanian:

Teknologi pasca panen dan pengolahan hasil. (Wawancara pada tanggal 27 April 2021)

Wawancara dengan Ibu Isnaini Ulfa diperoleh informasi mengenai pemanfaatan teknologi pertanian berikut:

Karena masih di desa jadi belum menggunakan teknologi modern.

(Wawancara pada tanggal 30 Mei 2021)

Wawancara dengan Ibu Jamini tentang pemanfaatan teknologi pertanian berikut ini:

Penggunaan traktor dalam pengolahan lahan dan cangkul. (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Wawancara dengan Ibu Ngatmi diperoleh informasi yakni:

Kelompok wanita tani hanya mampu menggunakan cangkul atau parang
(Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Tanggapan di atas jelas memberikan gambaran bahwa pemanfaatan teknologi bisa dilakukan dengan melihat di youtube dan juga berkonsultasi dengan penyuluh karena penyuluh yang membina. Teknologi pasca panen dan pengolahan hasil. Karena masih di desa jadi belum menggunakan teknologi modern. Penggunaan traktor dalam pengolahan lahan dan cangkul.

Hasil observasi yang dilihat bahwa anggota KWT Kates Jingga dalam mengolah lahan perkarangan untuk berkebun belum menggunakan alat atau teknologi yang canggih. Saat ini semua kelompok menggunakan peralatan-peralatan yang bersifat tradisional (cangkul, dan lainnya). Sedangkan untuk melakukan penanaman telah ada langkah pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Kemudian dari proses tanaman tersebut dilakukan pengemburan tanah kembali setelah panen.

Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa KWT Kates Jingga dalam melaksanakan program KRPL atau pemanfaatan lahan perkarangan belum menggunakan teknologi yang canggih, sehingga masih memanfaatkan teknologi tradisional sebagai alat untuk mengolah tanaman. Dengan demikian dalam pengolahan lahan pertanian KWT Kates Jingga belum menggunakan dan memanfaatkan peralatan yang berteknologi canggih.

Berdasarkan dari tanggapan yang disampaikan informan di atas sangat jelas terlihat bahwa dalam pelaksanaan program KRPL yang dijalankan KWT Kates Jingga Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu belum mampu beradaptasi dengan baik dalam menjalankan KRPL. Di mana dalam program KRPL yang sudah berjalan belum sepenuhnya mampu dijalankan dengan maksimal oleh seluruh anggota kelompok.

Hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa belum efektifnya Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani yang dijalankan KWT Kates Jingga Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil ini dilihat dari belum seluruh anggota kelompok yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama dalam mengolah pertanian, semangat kebersamaan yang masih rendah, kemudian dalam mengolah pertanian KWT Kates Jingga belum memanfaatkan teknologi pertanian.

C. Faktor Penghambat Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani

1. Mencapai Tujuan

Dalam mencapai tujuan dari program optimalisasi lahan perkarangan yang dilaksanakan KWT Kates Jingga terdapat beberapa hambatan. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Firda Yanti dikatakan mengenai penghambat dalam mencapai tujuan bahwa:

Faktor alam yakni banjir (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Tarsuwi diketahui informasi mengenai penghambat dalam mencapai tujuan:

Pertemuan kelompok (kehadiran gotong royong kurang lebih kehadiran 505 dan yang tidak hadir 50%) (Wawancara pada tanggal 27 April 2021)

Wawancara dengan Ibu Isnaini Ulfa diperoleh informasi mengenai penghambat dalam mencapai tujuan berikut:

Anggota di mana anggota sering kendor atau kurang semangat jadi tujuan kurang tercapai. Hama yang sulit kita singkirkan atau basmi. Dana yang kurang mencukupi (Wawancara pada tanggal 30 Mei 2021)

Wawancara dengan Ibu Jamini berikut ini mengenai penghambat dalam mencapai tujuan:

SDM kelompok dan pendanaan dalam pengelolaan (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa hambatan dalam pencapaian tujuan adalah rendahnya kesadaran anggota kelompok KWT Kates

Jingga dalam menghadiri setiap kegiatan dan juga meningkatkan pengetahuannya. Kemudian faktor semangat untuk maju dan menghasilkan hasil yang maksimal belum mampu ditingkatkan.

Hasil observasi yang peneliti perhatian bahwa dalam pencapaian tujuan waktu yang ditetapkan sangat terbatas, sehingga pencapaian hasil dari bercocok tanam belum mampu memenuhi tujuan untuk meningkatkan ekonomi kelompok. Selain itu jenis tanaman yang ditanam memiliki waktu panen yang berbeda-beda, sehingga pencapaian hasil panen tidak sesuai dengan yang ditetapkan yakni 3 – 6 bulan. Selain itu terdapat faktor penghambat berupa faktor alam dan serangan hama terhadap tanaman. Kemudian dari segi keanggotaan rendahnya semangat kebersamaan, sehingga belum seluruh anggota memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama dalam menjalankan KWT Kates Jingga.

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalam mencapai tujuan terdapat faktor penghambat berupa faktor alam yakni banjir dan hama tanaman yang kurang teridentifikasi. Kemudian kebersamaan untuk menjaga semangat, persatuan, dan pengetahuan yang sama pada setiap kegiatan kelompok.

2. Integrasi Program

Integrasi program yang digeluti KWT Kates Jingga terdapat beberapa hambatan dalam mencapainya. Hasil wawancara dengan Bapak Tarsuwi diketahui informasi faktor penghambat integrasi program:

Kurang, dikarenakan tidak sesuai jadwal yang tersusun (Wawancara pada tanggal 27 April 2021)

Wawancara dengan Ibu Isnaini Ulfa diperoleh informasi mengenai faktor penghambat integrasi program berikut:

Kurangnya pengetahuan dari anggota KWT dalam pemanfaatan lahan secara benar (Wawancara pada tanggal 30 Mei 2021)

Wawancara dengan Ibu Jamini mengenai faktor penghambat integrasi program berikut ini:

Kurangnya kesadaran kelompok dalam pemanfaatan KRPL (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Rendahnya kebersamaan yang ditunjukkan anggota KWT menjadi faktor penghambat untuk mengintegrasikan program KRPL yang diterima KWT, sehingga tidak seluruh anggota memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama dalam menjalankan program ini.

Hasil observasi ditemukan pada saat adanya penyuluhan yang disampaikan tenaga penyuluh tidak seluruh anggota hadir mengikuti penyuluhan. Kemudian dalam memanfaatkan lahan perkarangan, tidak seluruh anggota KWT memanfaatkan lahan perkarangan di rumahnya untuk bercocok tanam.

Faktor penghambat dari integrasi yang ada pada KWT Kates Jingga dalam melaksanakan program KRPL ini adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan dari anggota KWT dalam pemanfaatan lahan secara benar, sehingga lahan perkarangan yang tersedia tidak termanfaatkan dengan maksimal.

3. Adaptasi

Adaptasi dalam melaksanakan program pemanfaatan lahan perkarangan yang dijalani KWT Kates Jingga terdapat beberapa hambatan. Wawancara dengan

Ibu Isnaini Ulfa diperoleh informasi mengenai faktor penghambat adaptasi berikut:

Penyesuaian KWT, minimnya kebiasaan dari anggota mereka masih menggunakan kebiasaan lama, seperti kebiasaan yang dilakukan di rumah dengan simpel seperti itu dan jadi kurang adaptasi dan susah menyesuaikan dengan program KRPL. (Wawancara pada tanggal 30 Mei 2021)

Wawancara dengan Ibu Jamini berikut ini mengenai faktor penghambat adaptasi:

Kurangnya pembinaan dari instansi terkait (terutama pihak desa) (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2021)

Faktor penghambat dari adaptasi yang ada pada KWT Kates Jingga adalah penyesuaian KWT, minimnya kebiasaan dari anggota mereka masih menggunakan kebiasaan lama, seperti kebiasaan yang dilakukan di rumah dengan simpel seperti itu dan jadi kurang adaptasi dan susah menyesuaikan dengan program KRPL.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam melaksanakan program optimalisasi lahan perkarangan yang dijalankan KWT setidaknya terdapat beberapa hambatan yang menghadangnya yakni masalah pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama, semangat kebersamaan, faktor alam dan hama yang menghadang, belum memanfaatkan teknologi untuk bercocok tanam. Selain itu peran pemerintah daerah dalam membina masyarakat belum sepenuhnya berjalan

dengan maksimal, sehingga KWT yang ada belum mampu meningkatkan hasil pertanian dan usaha pertanian berjalan dengan kontinu.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa belum efektifnya Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani yang dijalankan KWT Kates Jingga Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil ini dilihat dari *Pertama* indikator pencapaian tujuan, yakni waktu pencapaian program KRPL mulai dari pengajuan permohonan dan pencairan serta pelaksanaan lapangan hingga memperoleh hasil berada pada kisaran waktu 3-6 bulan. Sasaran untuk meningkatkan perekonomian keluarga, pengetahuan, dan keterampilan dari anggota KWT belum sepenuhnya mampu dicapai. Dasar hukum dalam pelaksanaan KRPL yang diterima KWT Kates Jingga yakni berpedomankan dari undang-undang ketahanan pangan.

Kedua indikator integrasi, telah ditetapkan prosedur pemanfaatan lahan perkarangan dari pemerintah daerah dan disepakati anggota KWT. Telah dilaksanakan sosialisasi pemanfaatan lahan perkarangan oleh tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL kepada anggota KWT dalam berbagai hal yang sesuai dengan program KRPL. Adanya komunikasi yang terhubung antara pemerintah dengan anggota KWT, sehingga berbagai informasi pelaksanaan KRPL terus diperbaharui.

Ketiga indikator adaptasi, mengatasi masalah hama dalam bercocok tanam merupakan masalah yang harus terus dipahami, sehingga hasil bercocok tanam menjadi maksimal. Pada penelitian KWT Kates Jingga telah mendapatkan pengetahuan mengatasi masalah hama yang selalu disampaikan oleh tenaga penyuluh pertanian. KWT Kates Jingga belum menggunakan teknologi yang canggih, sehingga masih memanfaatkan teknologi tradisional sebagai alat untuk mengolah tanaman. KWT Kates Jingga belum mampu beradaptasi dengan baik dalam menjalankan KRPL, sehingga hasilnya belum dirasakan dengan maksimal oleh seluruh anggota kelompok.

Hambatan dalam melaksanakan program optimalisasi lahan perkarangan ini dilihat dari *Pertama* belum seluruh anggota kelompok mendukung terwujudnya program KRPL yang dijalankan KWT Kates Jingga sesuai yang direncanakan, *Kedua* belum tercapainya pelaksanaan program, *Ketiga* belum mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam mengatasi berbagai permasalahan pertanian.

B. Saran

Adapun saran-saran yang menjadi masukan dari hasil penelitian yang diperoleh yakni:

1. Konsistensi dalam menjalankan program sesuai dengan yang direncanakan baik dari pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun kelompok wanita tani itu sendiri

2. Menetapkan program-program kerja yang bisa direalisasikan dan konsisten dalam menjalankan program kerja.
3. Memanfaatkan semua media yang bisa dijadikan sumber rujukan dalam mengembangkan pertanian



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. 2013. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Beratakusumah, Deddy Supriadi. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cresswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Cresswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Riset. Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoyohadikusumo, Sumitro. 2012. *Pengantar Analisis Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Erlangga.
- Dunn, William N, 2003. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Hanin Data.
- Efendi, Mahrizal. 2003. *Pembinaan Ekonomi dan budaya Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ermaya, Suradinata. 2004. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Ramadan
- Garna, Yudistira K,. 1999. *Metoda Penelitian: Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Primaco Akademika
- Lubis, M. Solly, 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN.

- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins
- Miles, Matthew & Huberman, A Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy, J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology Jilid 1 dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Nugroho, D Riant, 2008. *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Elexmedia.
- Rukmana, R. 2009. *Bertanam Sayuran di Pekarangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono, AG, 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hesse/Nogi S, 2007, *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Tobing, Joshep. 2011. *Kiat Menjadi Supervisor Handal*. Jakarta: Erlangga
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2014. *Pengantar Administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Presindo

Winkel, 2002. *Dampak Pembangunan dan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah*. Yogyakarta: Depdikbud.

Westra, Pariata, dkk, 2011, *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/KPTS/RC.110/J/01/2017 Tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017

Jurnal/Skripsi/Tesis

Bayu Rohmatulloh, Dini Rochdiani, Dan Sudrajat. 2020. Tingkat Partisipasi Anggota Dalam Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (Studi Kasus di KWT Mekar Wangi Desa Mekar Mulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH Volume 7, Nomor 1, Januari 2020 : 56 – 66*

Haeruddin, 2010. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Tambahan Pendapatan Ekonomi Masyarakat di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Educational. Vol 5 No.1 Juni 2010.*

Risa Yulandani. 2020. Pelaksanaan Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018. *JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020*

Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 5 No. 1.*

Willy Mulya Putri. 2017. Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) Cahaya Kampung Tualang Oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Siak Tahun 2016. *JOM FISIP Vol. 4 No. 2 _ Oktober 2017*

Yuli Kurniyati, Fitri Rahmawati, dan Pulut Suryati. 2014. Optimalisasi Pemanfaatan Dan Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Inotek, Volume 18, Nomor 1, Februari 2014*



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3478 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Rika Melandani
NPM : 177310490
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Efektivitas Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
Perkarangan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu
Persentase Plagiasi : 23%
Jumlah Halaman : **90 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230